

RANCANGAN AWAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUKAMARA

RENCANA KERJA TAHUN 2026



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Untuk itu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara menyusun Renja tahun 2026, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan guna mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Dengan tersusunnya Renja tahun 2026 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan Renja ini.

Sukamara, Pebruari 2025

Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukamara

DENNY YUDHISTIRA KURNIAWAN, S.IP
NIP. 19750708 200312 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 28

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional 34

3.3 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 40

3.4 Program dan Kegiatan... .. 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 58

BAB V PENUTUP 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten /Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

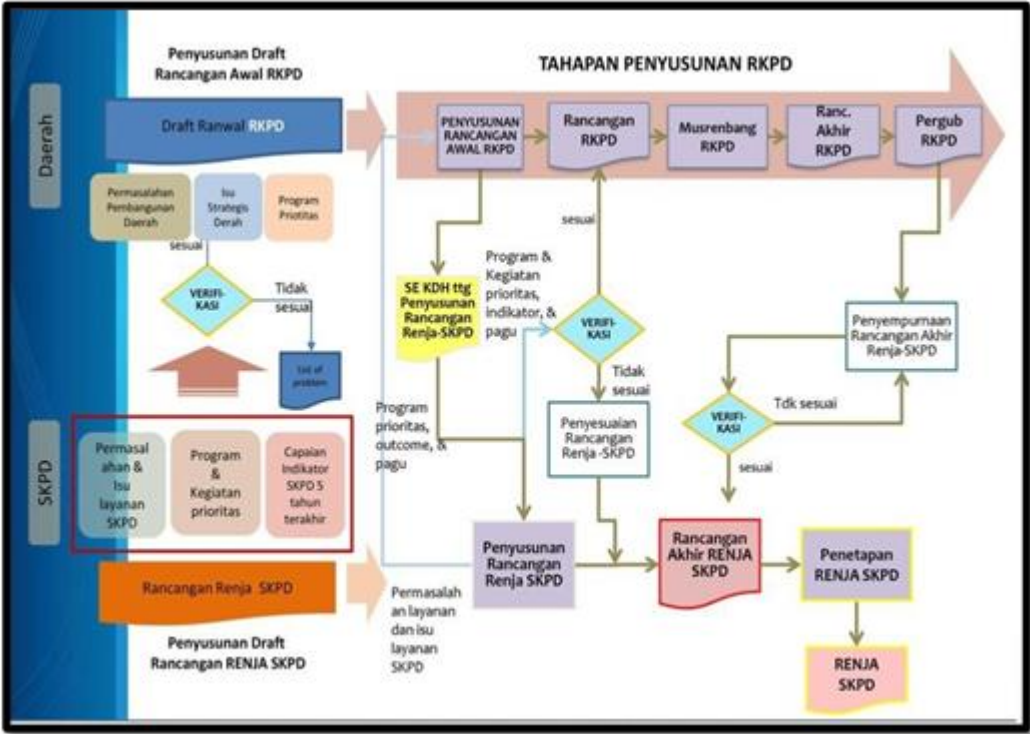
Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SOPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2026.

Renja SOPD merupakan dokumen rencana pembangunan SOPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SOPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2024 s/d 2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Sukamara sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang tertuang dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) tahun 2024 s/d 2026

Gambar 1.1
Hubungan antara RENJA dan Penyusunan RKPD



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2024 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 11) Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 13) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
- 14) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 69);
- 18) Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 9).
- 19) Peraturan Bupati Sukamara nomor 24 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Sukamara tahun 2026, tanggal 2 Juli 2024. Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 24

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2026 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2026.

Tujuan :

- a. Memberikan arah dan panduan bagi penyelenggaraan pembangunan di bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Tahun 2026.
- b. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Kegiatan

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan evaluasi untuk menilai keberhasilan dari rencana program kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2024 dan Capaian Renstra DiskominfoSandi adalah realisasi terhadap pencapaian Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2024

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program(Ou tcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2022 (N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun Lalu (2024)			Target Program / Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja OPD Tahun N-2 (2023)	Realisasi Renja OPD Tahun N-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (N- 1) (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	6	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	1	6	0	1	2.0 2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	21 Orang/Bulan	100%
2	1	6	0	1	2.0 2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan daerah Dengan Baik	8 Dolumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
2	1	6	0	1	2.0 2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir Tahun SKPD dann Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 laporan	10 Laporan	10 laporan	10 laporan	100%

2	1 6	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
2	1 6	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
2	1 6	0 1	2.0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Bimtek Sesuai Tugas dan Fungsinya	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	12 Orang	12 Orang	100%	
2	1 6	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah										
2	1 6	0 1	2.0 6	0 9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
2	1 6	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
2	1 6	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis dan logistik	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
2	1 6	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
2	1 6	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya / berlangganan dengan mas media	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
2	1 6	0 1	2.0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Snack untuk rapat dan kunjungan tamu	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100 %	100%	8 Laporan	8 Laporan	100%	
2	1 6	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar kota dan dalam daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%	
2	1 6	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Insfrastruktur kantor										
2	1 6	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur Gedung multi media	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	100%	5 Unit	5 Unit	100%	
2	1 6	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Komputer PC AIO	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	4 Unit	4 Unit	100%	

2	1 6	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
2	1 6	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100 %	100%	0 Laporan	0 Laporan	100%	
2	1 6	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jas listrik dan Telepon	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
2	1 6	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keamanan dan Kebersihan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%	
2	1 6	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah											
2	1 6	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayar pajaknya	14 Unit	14 Uniit	14 Unit	14 Unit	100%	100%	14 Unit	14 Unit	100%	
2	1 6	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya printer, laptop dan komputer	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	100%	15 Unit	15 Unit	100%	
2	1 6	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
2	1 6	0 2	2.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
2	1 6	0 2	2.0 1	0 7	Layanan Hubungan Media	Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	
2	1 6	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											

1	20	04	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
1	20	04	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penata Laksanaan Dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	20	04	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya dan Terselenggarannya Jaringan Insfrastruktuk TIK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
1	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										
1	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
1	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Cetak Buku Statistk Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										

2	2 1	0 2	2.2 1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2	2 1	0 2	2.2 1	0 2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan SOP Urusan Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	2 1	0 2	2.2 1	0 3	Pelaksanaan Keamanan InformasiPemerintahan Daerah Kabupaten/KotaBerbas is Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Sosialisasi Keamanan Data pada Lingkup SOPD dan Badan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf d angka 12 Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara merupakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

a. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara melaksanakan Pengukuran Kinerja yang mengacu pada penilaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA).

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2024.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara berupaya untuk mewujudkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2024- 2026, salah satu Sasaran tersebut adalah Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien dan Transparansi Informasi Publik.

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja pada Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. Adapun capaian IKU Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

Tabel 2.1
Capaian Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target (2024)	Realisasi (2024)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Indeks SPBE	Indeks SPBE	Nilai	2,5	2,75	110%
2.	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi	100 %	Persentase	100%	100%	100%
3.	Tersedianya buku statistik daerah	Tersedia	Ada	Ada	Ada	Ada

A. *Peningkatan Indeks SPBE*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yakni Meningkatkan Penerapan e- Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien sedangkan untuk IKU berupa Indeks SPBE ditargetkan Tahun 2024 dengan nilai 2,5 dengan realisasi sebesar 2,75 atau 110% dari target.

Tabel 2.2
Realisasi Program Anggaran, Capaian Kinerja
Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
	Layanan Hubungan Media	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.241.553.876	2.199.353.138	98,12
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.241.553.876	2.199.353.138	98,12
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	241.015.500	238.368.000	98,90
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.910.329.605	1.872.282.090	98,01
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	90.208.771	88.703.048	98,33

Dilihat pada tabel diatas dapat dilihat untuk realisasi :

A. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media sebesar 97,12%.

Berdasarkan tabel di atas maka sub kegiatan Layanan Hubungan Media dengan pagu anggaran 1.429.395,00 mempunyai realisasi keuangan sebesar 97,24 Persen dan realisasi fisik sebesar 100 % berupa kerjasama dengan mas media untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun data mas media yang bekerja sama dengan Pemerintah daerah Sukamara dalam menyelenggarakan penyebaran informai antara lain :

Tabel 2.3
Tabel Kerjasama dengan mas media
Tahun 2024

NO	NAMA PT/CV	TENTANG	JENIS MEDIA	NAMA MEDIA ELEKTRONIK/WEBSITE
1	TVRI KALIMANTAN TENGAH	KERJASAMA DENGAN MEDIA TELEVISI NASIONAL TAHUN 2024	media elektronik	TVRI Kalimantan Tengah
2	PT. SHINTA BUANA VISION	KERJASAMA DENGAN MEDIA TELEVISI LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	SBTV Sukamara
3	PT. SUKAMARA JAYA VISION	KERJASAMA DENGAN MEDIA TELEVISI LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	SJTV
4	PT. SUARA KALTENG PRESS	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Mingguan SUARA KALTENG
5	PT. MEDIA PALANGKA PAMBELUM	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Harian PALANGKA POST
6	PT. PUTRA SAMPIT PERDANA	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Harian RADAR SAMPIT
7	PT. PALANGKA EKSPRES	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Harian PALANGKA EKSPRES
8	PT. KALTENG POS PRESS	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Harian KALTENG POS
9	PT. MEDIA BERSAMA	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Harian TABENGAN
10	LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE NASIONAL TAHUN 2024	media elektronik	kalteng.antaranews.com
11	PT. SAMPIT DIGITAL MEDIA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	beritasampit.co.id
12	PT. MEDIA KALIMANTAN MANDIRI	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	borneonews.co.id
13	PT. RAJA DIGITAL MEDIA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	matakalteng.com
14	PT. MEDIA KALTENG SEJAHTERA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	radar-kalteng.com
15	PT. HALO DAYAK NUSANTARA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	HALODAYAK.com
16	PT. INTIM MEDIA PERKASA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	www.intimnews.com

Kendala :

- Kurangnya anggaran

Solusi

- Mengajukan permohonan penambahan anggaran

B. Sub Kegiatan Penata Laksanaan dan pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupten/Kota sebesar 98,9% Berdasarkan tabel di atas Sub Kegiatan Penata Laksanaan dan pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupten/Kota pagu anggaran Rp 241.368.000,00 mempunyai realisasi keuangan sebesar 98,9% atau Rp 238.368.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

Gambar 2.1
Kegiatan Forum FGD
SOP SPBE dan PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO



Gambar 2.2
Cover Dokumen SOP SPBE





C. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel di atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah dengan pagu anggaran Rp 1.910.329.605,00 mempunyai realisasi keuangan sebesar 98,01% atau Rp 1.872.282.090,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

Dengan output pekerjaan antara lain :

1. Maintenance jaringan fiber optik

Terpeliharanya jaringan fiber optik Kabupaten Sukamara tahun 2024

Gambar 2.3
Maintenance Jaringan Fiber Optik





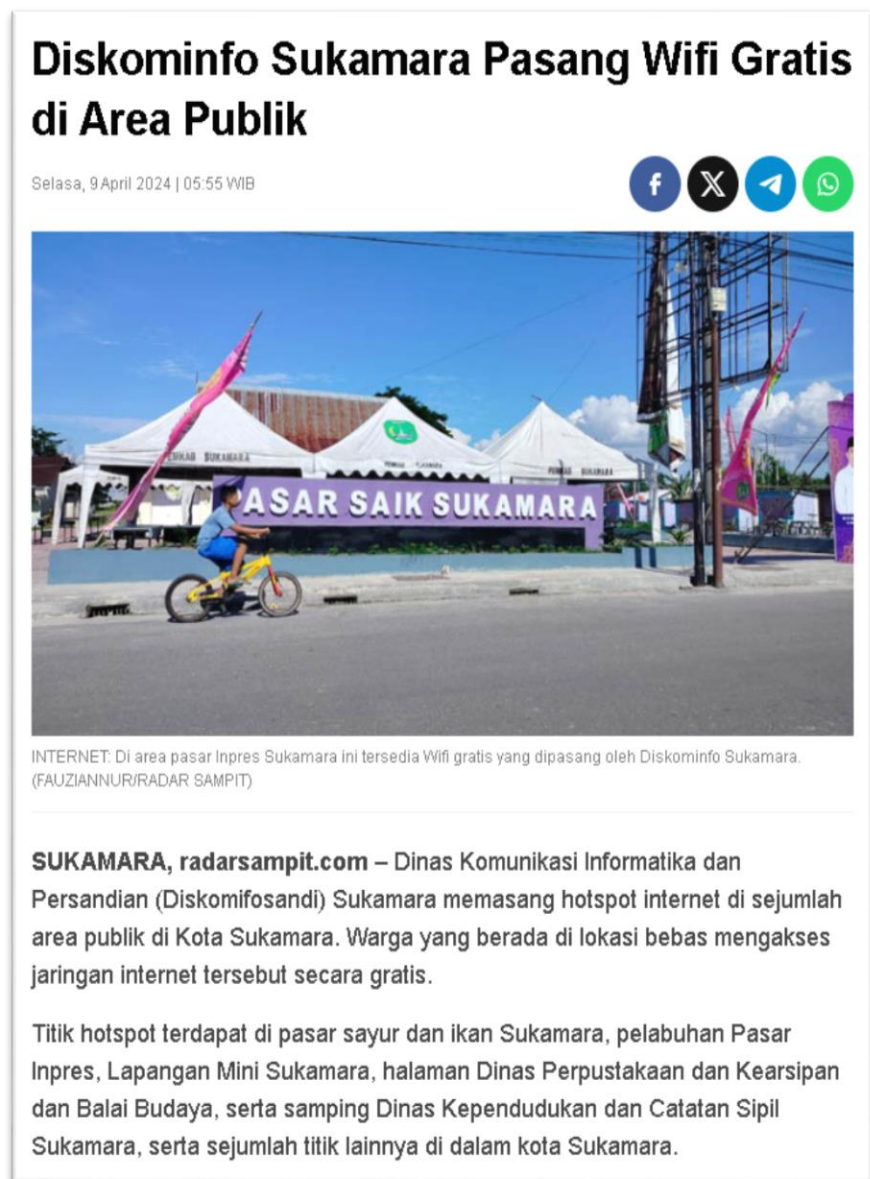
2. Terdistribusinya intranet dan internet satu pintu melalui Dinas Kominfosandi.

Pada kondisi ini Dinas Komunikasi Informatika dan persandian mampu melayani jaringan internet 26 SOPD dari total SOPD atau pencapaian 86,86 % dari SOPD yang ada. Sedangkan yang bisa dilayani sebanyak 4 SOPD karena jarak yang jauh dari Pusat Kabupaten.

3. Tersedianya Internet Umum /Wifi Publik

Pada kondisi ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memelihara dan memfasilitasi keberadaan WIFI Publik di tempat umum Kabupaten Sukamara.

Gambar 2.4
Pemasangan Wifi Publik



4. Pemeliharaan Server Kabupaten Sukamara

Pada Pekerjaan ini maka Diskominfo menjaga kelangsungan dan keberlanjutan SERVER Kabupaten yang telah di gunakan sebagian SOPD.

- D. Sub Kegiatan Pengelolaan E Government Chief Information Officer (GCIO)
- Berdasarkan tabel di atas Sub Kegiatan Pengelolaan E Government Chief Information Officer (GCIO) dengan pagu anggaran Rp 90.208.771,00 mempunyai realisasi keuangan sebesar 98,33% atau Rp 88.703.048,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pada sub kegiatan ini berisi pengadaan komputer dan perlengkapannya untuk menunjang urusan PPID (Pejabat Pengelola Informasi daerah)

2. *Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi*

Tabel 2.4
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	37.997.500	15.436.095	40,62
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	37.997.500	15.436.095	40,62
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.997.500	15.436.095	40,62
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.815.000	7.000.000	33,63
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	17.182.500	8.436.095	49,10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yakni Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi dengan realisasi keuangan sebesar 40,62% atau Rp 15.436.095,00 dari Pagu Rp 37.997.500,00. Dengan Realisasi Fisik sebesar 100 %.

Sub Kegiatan Pendukung Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi

A. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

Sub kegiatan ini dengan pagu Rp 20.815.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.000.000,00 atau realisasi keuangan sebesar 33,63 %.

Dengan Output Pekerjaan antara lain :

- 1. Perbaikan radio SSB

Gambar 2.5
Maintenance Jaringan SSB



2. Sosialisasi Keamanan Informasi

Pekerjaan ini tidak dilaksanakan karena :

- Tidak terdapat SDM yang mempunyai keahlian Persandian yang bersertifikasi

Solusi

- Dievaluasi untuk tahun anggaran berikutnya
- Melaksanakan BIMTEK untuk SDM urusan Persandian

B. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Sub kegiatan ini dengan pagu Rp 17.182.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.436.095,00 atau realisasi keuangan sebesar 49,10 %.

Dengan Output Pekerjaan antara lain :

1. Bimbingan Teknis Persandian
2. Evaluasi TTE

Tidak di laksanakan karena :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Persandian

Solusi :

- Mengajukan penambahan SDM ke Badan Kepegawaian Daerah Kab Sukamara

3. Tersedianya buku statistik daerah

Tabel 2.5
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tersedianya Buku Statistik Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Tersedianya buku statistik daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	170.105.100	144.280.447	84,82
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	170.105.100	144.280.447	84,82
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	170.105.100	144.280.447	84,82
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	123.880.100	110.955.447	89,57
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	46.225.000	33.325.000	72,09

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yakni Tersedianya Buku Statistik Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 84,82 % atau Rp 144.280.447,00 dari Pagu Rp 170.105.100,00. Dengan Realisasi Fisik sebesar 100 %.

Sub Kegiatan Pendukung Tersedianya buku statistik daerah adalah :

A. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Sub Kegiatan ini dengan Pagu sebesar Rp 123.880.700 dengan realisasi keuangan sebesar 89,57 % atau Rp 110.955.447,00.

Dengan Output Pekerjaan antara lain :

1. Cetak Buku Sukamara dalam angka.
2. Cetak Buku Inkesra.
3. Cetak Buku PDRB.

Gambar 2.6
Pendistribusian Buka Buka Statistik



B. Sub Kegiatan Koordinasi Membangun Meta Data Statistik Sektoral

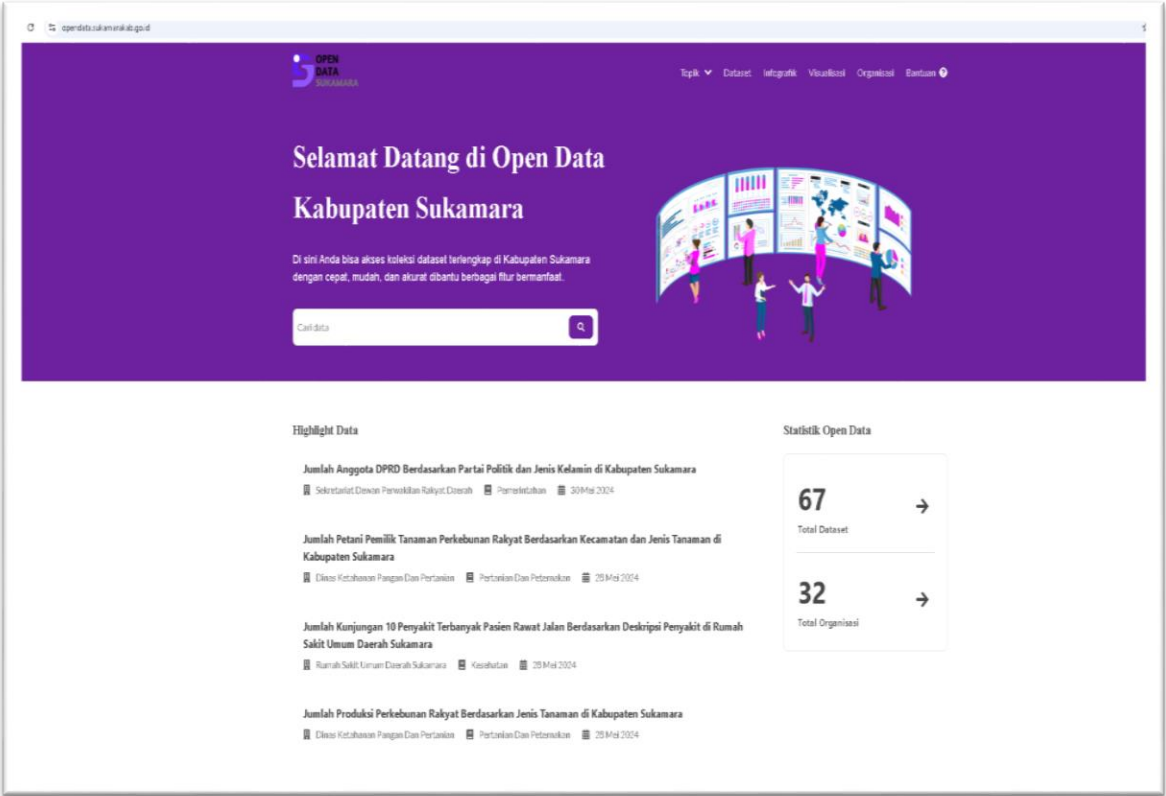
Sub Kegiatan ini dengan Pagu sebesar Rp 46.225.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 72,09 % atau Rp 33.325.000,00 dan realisasi Fisik 100 %.

Dengan Output Pekerjaan antara lain :

1. Membangun Satu Data Sukamara

Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sukamara memiliki kebutuhan untuk membangun Satu Data Sukamara yang dimiliki oleh seluruh OPD dan Desa/Kelurahan sehingga Masyarakat mendapatkan kemudahan akses pemanfaatan terhadap data public dari tingkatan paling bawah

Gambar 2.7
Portal Satu Data Sukamara



Gambar 2.8
Pelatihan Operasional Satu Data



Tabel C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Inforamtika dan Persandian
Kab. Sukamara

NO	INDIKATOR KINERJA	Spm / Standar Nasional	IKK	TARGET RESNTRA DAERH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2023	2024	2026	2026	2023	2024	2026	2026	
1	Peningkatan Indeks SPBE		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,8	2,7	3	3,5	1,8	2,5	3	3,5	
3	Tersedianya buku statistik daerah		Buku Sukamara dalam angka,	tersdia	tersdia	tersdia	tersdia	tersdia	tersdia	tersdia	tersdia	
5	Keamanan Persandian		Jaringan Internet	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD 2026 dengan tema “ Implementasi Pembangunan Kemitraan Yang Inklusif Sebagai Perwujudan Kabupaten Sukamara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing “ dan dalam rangka “ Penguatan Pondasi Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Sukamara” seperti yang tertuang dalam arash kebijakan tahap I RPJPD kabupaten Sukamara.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yaitu meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan Diskominfo dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan capaian kinerja pelayanan Diskominfo selama satu tahun berjalan, tantangan dan peluang yang ada, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Diskominfo yaitu :

1. Peningkatan E-Government dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam hal tersebut ada hambatan atau kendala dalam penyusunan Indeks SPBE yaitu :
 - Belum ada peraturan yang mengatur Arsitektur SPBE dari Kementerian
 - Belum adanya peraturan Bupati terkait Proses Bisnis
 - Untuk indikator audit TIK dalam aturan nasional belum ada lembaga swasta/negeri yang di tunjuk sebagai pemeriksa eksternal dalam audit TIK
2. Belum optimalnya pemanfaatan media sebagai sarana penyebarluasan informasi, khususnya website pemerintah daerah.
3. Ketersediaan dan kualitas data sektoral belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan data perencanaan pembangunan.
4. Jumlah kuantitas dan kwalitas SDM dalam bidang persandian belum mencukupi, serta belum adanya kelengkapan SOP terkait Keamanan Informasi.
5. Sarana prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika yang kurang memadai.

Strategi yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah :

1. Strategi/solusi yang diambil dalam mencapai penyusunan SPBE adalah :
 - Merancang Arsitektur SPBE berdasarkan dari Perpres gangguan serius atau bencana yang menimpa satu atau berbagai unit kerja.
 - Ketersediaan Data Center
 - Adanya peningkatan kapasitas server untuk colocation aplikasi SPBE
 - Koordinasi dengan bagian Organisasi terkait Proses Bisnis Kabupaten karena Proses Bisnis sebagai acuan dasar merancang Arsitektur SPBE
2. Mengaktifkan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Sukamara.
3. Penyusunan Metadata untuk mencukupi Ketersediaan dan kualitas data sektoral .
4. Pelatihan sesuai spesifikasi pekerjaan dalam bidangpersandian, Penyusunan SOP urusan persandian sesuai proses bisnis.
5. Pengembangan sarana prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tantangan Dan Peluang dalam Peningkatan E-Government dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berikut :

Tantangan :

- Belum ada regulasi terkait pelaksanaan E-Governmen Kabupaten Sukamara Khususnya TIK
- Pembangunan Jaringan FIXED BROADBAND (FO) seluruh perangkat daerah Kab. Sukamara belum menyeluruh
- Optimalisasi Data Center Kab. Sukamara
- Peningkatan infrastruktur dan kualitas pengamanan informasi
- Pemahaman SDM terhadap pentingnya keamanan informasi masih terbatas.

Peluang :

- Ketersediaan SDM TIK
- Pengembangan Aplikasi secara mandiri untuk pelaksanaan SPBE
- Tersedianya Blue Print untuk pedoman pelaksanaan e-government
- Tersedianya DRC (Disaster Recovery Center) yang berfungsi untuk menempatkan sistem, aplikasi, hingga data-data cadangan ketika terjadi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah,

terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar tercapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan/sub kegiatan maupun besaran pendanaanya.

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sukamara Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel T-C. 31 sebagai berikut :

TABEL T-C 31
Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukamara

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				12.680.575.470,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				12.680.575.470,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.680.575.470,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.137.557.692,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.912.791.895,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4340507400	

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sukamara	Persentase Keterpenuhan administrasi perangkat daerah	100%	5.239.120.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sukamara	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Tersedianya Laporan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Menindak lanjuti temuan dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi	12 Bulan 12 Laporan 2 Laporan 8 Laporan	8.036.144.070,00	
---	--	----------	---	------	------------------	--	----------	--	--	------------------	--

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Sukamara	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan	100%	50.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Sukamara	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi infomasi dengan menggunakan sarana media massa	100 % 1 Dokumen	1.885.455.000,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Sukamara	Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-governmen t	65%	6.862.791.895,00		Sukamara	Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-government	65%	2.455.052.400,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase pemenuhan data statistik Sektoral	100%	155.856.273,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah	100 %	268.924.000,00	

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Sukam ara	Persentase Perangkat daerah yang telah mengguna kan layanan keamanan persandian	100 %	372.807.302,00	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Sukamara	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian	100 %	35.000.000,00	
---	---	--------------	---	-------	----------------	---	----------	---	-------	---------------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi. LSM. asosiasi-asosiasi. perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Tabel T - C32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2026
Kabupaten Sukamara

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran /Volume	Catatan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

a. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Visi Kementerian Kominfo adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Kementerian Kominfo. Tujuan Kementerian Kominfo yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, antara lain:

1. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang
2. sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
4. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
5. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
6. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan yang juga menjadi leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran serta regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran dan bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, Sejumlah Sasaran Strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;

2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
 - a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
 - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
 - c. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi e-Governmen dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost- effective melalui:
 - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (*cloud computing*).
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (*secured government network*) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.

3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
 - e. partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - f. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
 - g. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya,
 - h. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - i. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - j. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - k. Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - l. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

- b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
- c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media

. b. Lembaga Sandi Negara

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan antar kabupaten lingkungan Kabupaten;
4. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi
11. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar
12. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

13. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan komunikasi sandi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
16. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan komunikasi sandi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
17. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan komunikasi sandi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
18. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan hubungan komunikasi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
19. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
20. Pengamanan terhadap kegiatan / asset / fasilitas / instalasi penting / vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. Pengamanan informasi elektronik;
22. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
24. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
26. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

c. Badan Pusat Statistik

Merujuk pada visi Badan Pusat Statistik sebagai **“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Kondisi Awal			Target Pembangunan			Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2026	2026	
Isu Strategis : Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemanfataan Teknologi Informasi dan Komunikasi										
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik	Terwujudnya Kinerja tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Peningkatan Indeks SPBE	1,54	1,84	2	2,5	3	3,5	3,5
			Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya buku statistik daerah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai supporting staff yang melaksanakan koordinasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan e-Government di Pemerintah Kabupaten Sukamara dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang e-Government dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa kebijakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Program kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara untuk mencapai tujuan dan sasarannya adalah :

T-C 33

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. SUKAMARA
Tahun Anggaran 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			12.680.575.470,00					12.290.155.000,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.680.575.470,00					12.290.155.000,00
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			12.376.651.470,00					11.770.155.000,00
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Tersedianya Laporan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Menindak lanjuti temuan dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	12 Bulan 12 Laporan 2 Laporan 8 Laporan	8.036.144.070,00				-	7.185.000.000,00

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menindak lanjuti temuan dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	1 Dokumen 10 Laporan 12 Bulan 2 Laporan	3.598.125.195,00			-	-	3.300.000.000,00
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.481.385.195,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3.200.000.000,00
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	49.740.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	67.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	12 Laporan 2 Laporan	470.484.000,00			-	-	360.000.000,00
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	20.484.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		60.000.000,00
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	450.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		300.000.000,00

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	12 Bulan 1 Laporan	913.327.300,00			-	-	640.000.000,00
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	205.327.300,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		10.000.000,00
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	67.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		50.000.000,00
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		20.000.000,00
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	37.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		75.000.000,00
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		30.000.000,00
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		20.000.000,00
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	33.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		35.000.000,00
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		400.000.000,00	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasana pendukung perkantoran Dinas Kominfosandi Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	4 paket 4 Paket	2.274.175.575,00			-	-	1.890.000.000,00
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	451.309.300,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		100.000.000,00	
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	30.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		90.000.000,00	
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.900.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		200.000.000,00
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1.578.766.275,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.200.000.000,00
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	93.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		150.000.000,00
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		150.000.000,00

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	12 Bulan 12 Laporan	399.872.000,00			-	-	395.000.000,00
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	241.472.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		180.000.000,00
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	158.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		215.000.000,00
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya sarana dan prasarana Dinas Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	2 Paket 2 Dokumen	380.160.000,00			-	-	600.000.000,00
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	135.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		150.000.000,00
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	49.150.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		150.000.000,00
	2	16	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		100.000.000,00
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	195.510.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		200.000.000,00

2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi infomasi dengan menggunakan sarana media massa	100 % 1 Dokumen	1.885.455.000,00				-	1.885.155.000,00
---	---	----	----	--	--	--	--	--------------------	------------------	--	--	--	---	------------------

	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi infomasi dengan menggunakan sarana media massa	1 Dokumen	1.885.455.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	1.885.155.000,00
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media								

						Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	15 Laporan	1.885.455.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas		1.885.155.000,00
--	--	--	--	--	--	---	------------	------------------	--	-------------------------	---	--	------------------

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-goverment	70 %	2.455.052.400,00				-	2.700.000.000,00
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat mitra pemerintah	5 kelompok	155.088.000,00			-	-	300.000.000,00
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa								
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2 Dokumen	155.088.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		300.000.000,00
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis SPBE Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik berbasis SPBE	12 Bulan 12 Bulan	2.299.964.400,00			-	-	2.400.000.000,00
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE								
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen	228.850.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		300.000.000,00

	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota							
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	32 Perangkat Daerah	349.970.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	350.000.000,00
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet							
							Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	32 Perangkat Daerah	1.721.144.400,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1.750.000.000,00
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			268.924.000,00				220.000.000,00
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah	1000 %	268.924.000,00				220.000.000,00
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah	100 %	268.924.000,00			-	220.000.000,00
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral							

						Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	118.374.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		120.000.000,00
	2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral							
						Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan	150.550.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		100.000.000,00
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		35.000.000,00					300.000.000,00
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian	100 %	35.000.000,00			-	300.000.000,00
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian	100 %	35.000.000,00			-	300.000.000,00
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5 Laporan	35.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		150.000.000,00

	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan							
						Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	5 Laporan	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		150.000.000,00
	J U M L A H							12.680.575.470,00					12.290.155.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Sukamara Tahun

2026

Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun
2026

Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIANKAB. SUKAMARA
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN						12.680.575.470,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.680.575.470,00			
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						12.376.651.470,00			

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Tersedianya Laporan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Menindak lanjuti temuan dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	-			12 Bulan 12 Laporan 2 Laporan 8 Laporan	8.036.144.070,00			
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menindak lanjuti temuan dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	-			1 Dokumen 10 Laporan 12 Bulan 2 Laporan	3.598.125.195,00			
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.481.385.195,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	49.740.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	67.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	-			12 Laporan 2 Laporan	470.484.000,00			
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	20.484.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	450.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	-			12 Bulan 1 Laporan	913.327.300,00			
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	205.327.300,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	67.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	37.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	33.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasana pendukung perkantoran Dinas Kominfosandi Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	-			4 paket 4 Paket	2.274.175.575,00					
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	451.309.300,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	30.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	60.900.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1.578.766.275,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	93.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	60.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	-			12 Bulan 12 Laporan	399.872.000,00			
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	241.472.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	158.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya sarana dan prasarana Dinas Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	-			2 Paket 2 Dokumen	380.160.000,00			
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	135.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	49.150.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	195.510.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi infomasi dengan menggunakan sarana media massa	-			100 % 1 Dokumen	1.885.455.000,00			

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi infomasi dengan menggunakan sarana media massa	-			1 Dokumen	1.885.455.000,00			
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media									
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				15 Laporan	1.885.455.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-goverment	-			70 %	2.455.052.400,00			
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat mitra pemerintah	-			5 kelompok	155.088.000,00			
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa									

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

						Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				2 Dokumen	155.088.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis SPBE Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik berbasis SPBE	-			12 Bulan 12 Bulan	2.299.964.400,00		
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE								
						Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	228.850.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota								
						Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				32 Perangkat Daerah	349.970.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet								

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

						Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				30 Perangkat Daerah	1.721.144.400,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					268.924.000,00				
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah	-			1000 %	268.924.000,00			
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah	-			100 %	268.924.000,00			
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral									
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				100 %	118.374.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral									
							Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				2 Laporan	150.550.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						35.000.000,00			
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian	-			100 %	35.000.000,00			
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian	-			100 %	35.000.000,00			
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				5 Laporan	35.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
	J U M L A H											12.680.575.470,00			

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai pelaksanaan / penjabaran Renstra secara tahunan. Rancangan Rencana Kerja Tahunan sangat penting karena keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra sangat tergantung pada perencanaan tahunan yang disusun.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun 2026. Selain itu Rancangan Rencana Kerja Tahun ini juga berfungsi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2026 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Tupoksi dan pencapaian kinerja selama tahun 2026 nanti.

Kedepan diharapkan Rancangan Rencana Kerja Tahunan ini dapat sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan dan memperbaiki keberhasilan kinerja yang belum tercapai. Didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan. maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara.

B. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024 - 2026 tersebut. di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut. ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Dinas Komunikasi Indformatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2026. harus dilaksanakan secara konsisten. tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara

tahun 2026 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja pemerintah daerah.

3. Rencana Kerja (RENJA) SKPD. di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten).

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

Semoga keberadaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Sukamara serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sukamara.

Sukamara, Pebruari 2025
Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukamara

DENNY YUDHISTIRA KURNIAWAN, S.IP
NIP. 19750708 200312 1 009